

IMPLEMENTASI MODEL STANDAR ANALISIS BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH DI KOTA PADANG PANJANG, PROPINSI SUMATERA BARAT

Yaas Andria^{)} dan Bambang Kustitunto^{**)}*

ABSTRACT

This research intends to study the implementation of Standard Spending Assessment (SSA) in determining the fiscal needs of Padang Panjang Municipality for Primary dan Secondary Education, Health and Transportation the during period of 1991/1992 – 1999/2000. And then, attempts to predict fiscal needs for next 3 years after fully local autonomy and evaluate government's expenditure performance in each categories.

The data used in this research are primary and secondary data obtained from related institution in Padang Panjang Municipality and Sumatera Barat Province. To determine the real fiscal needs and to predict the next 3 years fiscal needs in each categories, will be used descriptive method analyzes. While Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Method (AKIP) will be used to analyze government expenditure performance in each categories.

The result of this research stated that the fiscal needs of Padang Panjang Municipality for Primary and Secondary Education, Health and Transportation were being overfinancing. While the result of Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Method indicated that the government's expenditure performance in Primary and Secondary Education in position of "medium" category, the government expendi-

ture performance for Health categorized as "good" and the government expenditure performance for transportation categorized as "less".

Keyword: *Fiscal needs, Descriptive Method Analysis, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Method*

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk di kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat, sering terjadi *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan berakibat menurunkan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah terletak pada sistem penganggaran yang digunakan, yaitu kombinasi *Line-Item Budgeting System* (Sistem Penganggaran masing-masing jenis penerimaan dan pengeluaran), dan *Incremental Budgeting System* (Sistem Penganggaran Tambahan). Berdasarkan kombinasi sistem tersebut memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk merevisi anggaran yang sedang berjalan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya harus diteruskan pelaksanaannya pada tahun berikutnya, serta lebih menitikberatkan pada selisih *incremental* antara anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

^{*)} Dra. Yaas Andria, M.Si., adalah alumni Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gajah Mada

^{**)} Drs. Bambang Kustitunto, M.A. adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada

Dengan bergulirnya reformasi yang menghasilkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dirancang suatu sistem anggaran dengan menggunakan *Performance Budgeting System* (Sistem Penganggaran Kinerja) yang lebih menekankan pada pengukuran hasil kerja dengan melihat segi efisiensi dan memaksimalkan output. *Performance Budgeting System* ini dikembangkan menjadi suatu model *Standar Spending Assesment* (Standar Analisis Belanja = SAB) yang memungkinkan setiap unit kerja dapat menentukan kebutuhan riilnya.

Menggunakan Standar Analisa Belanja tersebut, studi ini mencoba untuk menentukan kebutuhan pembiayaan anggaran belanja di Kota Padang Panjang, sehingga diketahui besarnya kebutuhan sebenarnya selama 9 tahun terakhir (1991-2000), dan memprediksi kebutuhan anggaran pada 3 tahun yang akan datang setelah otonomi daerah berjalan sepenuhnya, khususnya untuk Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (Jalan). Dan yang terakhir, studi ini berusaha mengukur kinerja pengeluaran pembangunan pemerintah pada ketiga dinas di atas, menggunakan Metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

HIPOTESIS

1. Penetapan besarnya kebutuhan pengeluaran Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (jalan) belum berorientasi kepada *Value for Money* sehingga menimbulkan kondisi *underfinancing* atau *overfinancing*.
2. Kinerja pengeluaran pembangunan Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum (jalan) menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Ma (1997) yang membandingkan pengeluaran pemerintah

di sembilan negara, disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diukur dengan membagi pengeluaran pemerintah ke dalam beberapa kategori. Penjumlahan kebutuhan seluruh kategori merupakan total kebutuhan anggaran pemerintah di negara tersebut.

Dallen dan Swank (1996) meneliti pengeluaran pemerintah di Belanda. Adapun variabel yang diamati adalah tingkat pendapatan, jumlah penduduk, tingkat harga, penduduk usia tua, penduduk usia muda, tingkat pengangguran serta variabel politik. Hasil pengamatan menyimpulkan bahwa variabel pendapatan dan tingkat harga tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, tetapi variabel jumlah penduduk dan politik berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah.

Di Indonesia, penelitian sejenis telah dilakukan oleh Indrajaya (2000) yang menilai bahwa pengeluaran pada infrastruktur di Kabupaten Sleman cenderung lebih besar dari kebutuhannya sedangkan kinerja yang dihasilkan oleh pengeluaran pemerintah tersebut masih memberikan kelemahan dan ancaman pada tugas pokok dan fungsi unit kerja yang menangani. Kemudian Yunasri (2000) mengevaluasi pengeluaran pemerintah yang terjadi pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Yogyakarta yang menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kategori kesehatan mengalami *overfinancing*, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kategori kebersihan dan pertamanan mengalami *underfinancing*.

Pusat Studi-Antar Universitas Studi Ekonomi (PAU-SE) Universitas Gadjah Mada (1999) mengembangkan Model Standar Analisa Belanja (SAB) pada 5 Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Tengah untuk penyusunan anggaran daerah pemerintah yang berorientasi kepada pendekatan anggaran kinerja. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggaran daerah harus mampu menjalankan dua fungsi sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen atau teknis operasional anggaran daerah yang berorientasi kepada kepentingan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penetapan kebutuhan dilakukan dengan Standar Analisa Belanja (SAB) yang meliputi dua aspek yaitu aspek mikro dan aspek makro.

TINJAUAN PUSTAKA

Ma (1997:38-41) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dibagi ke dalam beberapa kategori dengan menggunakan formula umum :

$$N_i = \text{Satuan Ukur} \times \text{Rata-rata Biaya Per Unit} \times \text{Indeks Penyesuaian}$$

Di mana N_i menunjukkan standar pengeluaran kategori i, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. *Satuan Ukur* merupakan jumlah satuan layanan publik dalam jumlah dan kualitas tertentu, *Rata-rata Biaya Per Unit* merupakan total pengeluaran nasional untuk kategori i dibagi dengan satuan ukur (misalnya : rata-rata biaya per unit untuk pendidikan dasar dan menengah adalah rasio antara total pengeluaran untuk pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah pelajar di daerah yang bersangkutan). Indeks Penyesuaian merupakan suatu kombinasi faktor-faktor yang membedakan biaya per unit pelayanan di daerah tersebut dari rata-rata nasional.

Adapun standar pengeluaran untuk kategori Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Jalan di Kota Padang Panjang dapat dihitung sebagai berikut

1. Pendidikan Dasar

Formula yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pengeluaran (N) untuk Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang adalah :

$$N_i = \text{Satuan Ukur} \times \text{Rata-rata Biaya Per Unit} \times \text{Indeks Penyesuaian}$$

Satuan Ukur adalah Jumlah murid SD di Kota Padang Panjang.

Rata-rata biaya per unit adalah Pengeluaran Pemerintah per kapita Propinsi untuk pendidikan dasar. Indeks Penyesuaian adalah $a_1IU + a_2IPNS$

IU (Indeks Upah) adalah rasio tingkat upah guru di Kota Padang Panjang terhadap rata-rata Propinsi.

IPNS (Indeks Pelajar Tidak Mampu) adalah rasio persentase jumlah murid yang tidak mampu di Kota Padang Panjang terhadap rata-rata Propinsi. Dan $a_1 + a_2 = 1$

2. Kesehatan

Formula yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pengeluaran (N) untuk Kesehatan di

Kota Padang Panjang adalah :

$$N_i = \text{Satuan Ukur} \times \text{Rata-rata Biaya Per Unit} \times \text{Indeks Penyesuaian}$$

Satuan Ukur adalah total penduduk di Kota Padang Panjang.

Rata-rata biaya per unit adalah Pengeluaran Pemerintah per kapita Propinsi untuk kesehatan ; Indeks penyesuaian adalah $a_3IKB + a_4IIHH + a_5IIKP$

IKB (Indeks Kematian Bayi) adalah rasio tingkat kematian bayi di Kota Padang Panjang terhadap rata-rata Propinsi.

IIHH (Invers Indeks Harapan Hidup) adalah rasio rata-rata harapan hidup Propinsi terhadap harapan hidup di Kota Padang Panjang.

IIKP (Invers Indeks Kepadatan Penduduk) adalah rasio rata-rata kepadatan penduduk Propinsi terhadap kepadatan penduduk di Kota Padang Panjang . Dan $a_3 + a_4 + a_5 = 1$

3. Kategori Jalan

Formula yang digunakan untuk menentukan kebutuhan pengeluaran (N) untuk Kategori Jalan di Kota Padang Panjang adalah :

$$N_i = \text{Satuan Ukur} \times \text{Rata-rata Biaya Per Unit} \times \text{Indeks Penyesuaian}$$

Satuan Ukur adalah total panjang jalan di Kota Padang Panjang.

Rata-rata biaya per unit adalah Pengeluaran Pemerintah untuk jalan per kapita Propinsi;

Indeks penyesuaian adalah $a_6IU + a_7IKJ + a_8IMsm + a_9IIKP$

IU (Indeks Upah) adalah rasio tingkat upah di daerah i terhadap rata-rata nasional.

IKJ (Indeks Kualitas Jalan) adalah rasio panjang jalan tidak beraspal di Kota Padang Panjang terhadap rata-rata Propinsi.

IMsm (Indeks Musim) adalah rasio curah hujan di Kota Padang Panjang terhadap rata-rata Propinsi.

IIKP (Invers Indeks Kepadatan Penduduk) adalah rasio rata-rata kepadatan penduduk Propinsi terhadap kepadatan penduduk di Kota Padang Panjang . Dan $a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = 1$

Untuk menghitung kebutuhan pengeluaran pada masa yang akan datang ditetapkan 3 skenario sebagai berikut :

1. Pesimis; jika besarnya kebutuhan pengeluaran didasarkan kepada tingkat suku bunga deposito

- rata-rata, yang berarti bahwa besarnya kebutuhan pengeluaran tersebut sukar diperoleh sedangkan data yang digunakan adalah besarnya kebutuhan pengeluaran tahun terakhir.
- Moderat; jika besarnya kebutuhan pengeluaran didasarkan kepada tingkat inflasi rata-rata, yang berarti bahwa besarnya kebutuhan pengeluaran tersebut mungkin diperoleh sedangkan data yang digunakan adalah besarnya kebutuhan pengeluaran tahun terakhir.
 - Optimis; jika besarnya kebutuhan pengeluaran didasarkan kepada tingkat suku bunga riil rata-rata, yang berarti bahwa besarnya kebutuhan pengeluaran tersebut dapat diperoleh sedangkan data yang digunakan adalah besarnya kebutuhan pengeluaran tahun terakhir.

Pembobotan setiap variabel indeks penyesuaian dan bobot kinerja pengeluaran pada Kategori Pendidikan Dasar ($a_1 + a_2 = 1$), Kategori Kesehatan ($a_3 + a_4 + a_5 = 1$), kategori Jalan ($a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = 1$) tidak menggunakan pendekatan ekonometrika tetapi dilakukan dengan Metode Delphi yaitu dengan menggunakan intuisi (*judgement*) responden yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya masing-masing variabel dalam Indeks Penyesuaian dan kinerja pengeluaran terhadap penentuan kebutuhan pembiayaan dan penyusunan anggaran. Berdasarkan variabel-variabel yang diamati, dalam hal tidak tersedianya data dan informasi yang mempengaruhi biaya penyediaan publik tersebut maka formula yang digunakan dapat disesuaikan dengan informasi, data dan kondisi yang ada.

Untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah yang nantinya akan memberikan informasi tentang kesesuaian program yang dilaksanakan dengan rencana, dapat digunakan pengukuran kinerja dengan Metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang faktual. Dasar pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator sebagai berikut :

- Indikator kinerja yang dikelompokkan atas indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*).
- Nilai Capaian Kegiatan, dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi dan rencana

anggaran secara relatif :

- Bobot Indikator Kinerja, dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang didasarkan pada visi,

$$\text{Nilai capaian Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

misi dan strategi pembangunan daerah. Bobot kegiatan ditentukan sehingga jumlah nilai capaian kegiatan program adalah 100 %.

$$\text{Nilai Capaian Kegiatan} = \frac{\text{Nilai Capaian Kegiatan} \times \text{Bobot kegiatan}}{\text{}} \times 100\%$$

- Nilai Capaian Akhir Kegiatan

Nilai capaian program diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai capaian akhir kegiatan dan diukur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal yaitu :

85 s/d 100	=	Baik
70 = X < 85	=	Sedang
55 = X < 70	=	Kurang
X < 55	=	Sangat Kurang

ALAT ANALISIS

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, metode deskriptif analitis, yang menggambarkan keadaan yang nyata terjadi dari suatu unit kerja dengan menghitung besarnya kebutuhan pengeluaran dan memprediksikan kebutuhan pengeluaran 3 tahun mendatang setelah otonomi berjalan sepenuhnya pada setiap kategori yang diamati di Kota Padang Panjang. *Kedua*, Metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mengukur kinerja pengeluaran pembangunan pada Kategori Pendidikan Dasar, Kategori Kesehatan, dan Kategori Jalan.

DATA

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder periode 1991/1992 – 1999/2000. Untuk menentukan pembobotan indeks penyesuaian dan bobot kinerja pengeluaran pemerintah diambil dari data

yang dikumpulkan dan diolah sendiri (data primer) melalui penyebaran kuesioner pada setiap kategori masing-masing 10 sampel pada dinas yang diteliti, 25 sampel pada Bappeda dan Bagian Keuangan Kota Padang Panjang, serta 10 sampel pada dinas yang berada di Propinsi, dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih adalah sampel yang berhubungan langsung dengan penyusunan anggaran.

Data sekunder yang dibutuhkan untuk kategori Pendidikan Dasar adalah jumlah murid SD, jumlah murid SD tidak mampu di Kota Padang Panjang dan Propinsi (diperoleh dari Badan Pusat Statistik), realisasi pengeluaran pemerintah serta upah guru di Kota Padang Panjang dan Propinsi (berasal dari Perhitungan APBD Kota Padang Panjang dan Propinsi).

Kategori kesehatan ditentukan oleh jumlah penduduk, tingkat kematian bayi, kepadatan penduduk Kota Padang Panjang dan Propinsi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, realisasi pengeluaran diperoleh dari Perhitungan APBD Kota Padang Panjang dan Propinsi, untuk usia harapan hidup diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dan Propinsi. Untuk kategori jalan, data sekunder berupa panjang jalan, panjang jalan tidak beraspal, tingkat upah, curah hujan dan kepadatan penduduk dari BPS, realisasi pengeluaran diperoleh dari Perhitungan APBD Kota Padang Panjang dan Propinsi, sedangkan kuesioner untuk penentuan bobot variabel dan bobot kinerja diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Keuangan dan Bappeda Kota Padang Panjang.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

a. Kebutuhan Pengeluaran

Pendidikan Dasar

Berdasarkan formula yang digunakan dan hasil perhitungan indeks penyesuaian (lihat lampiran II) didapatkan besarnya kebutuhan pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut:

$$N = 5.428 \text{ orang} \times \text{Rp } 13.470 / \text{orang} \times \{(0,53 \times 0,93) + (0,47 \times 0,04)\}$$

$$N = \text{Rp } 37.288.732$$

Jika dilihat realisasi pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun tersebut sebesar Rp 4.095.032.361 menunjukkan telah terjadi *overfinancing* dalam penyusunan anggaran sebesar: Rp. 4.095.032.361 – Rp 37.288.732 = Rp 4.057.743.629, dari kebutuhan yang seharusnya. Berdasarkan asumsi suku bunga deposito, inflasi dan suku bunga riil maka diperoleh besarnya kebutuhan pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang 3 tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Pesimis, perhitungan didasarkan kepada tingkat suku bunga deposito rata-rata yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang sukar diperoleh.

$$N = 37.288.732 \times (1 + 0,1870)^3 = 62.363.398.$$

Rp. 37.288.732,00 adalah kebutuhan belanja Dinas Pendidikan Dasar kota Padang Panjang pada tahun 1999/2000 (lihat Lampiran II tabel kedua).

2. Moderat, perhitungan didasarkan kepada inflasi rata-rata yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang mungkin dapat diperoleh.

$$N = 37.288.732 \times (1 + 0,1668)^3 = 59.233.429.$$

3. Optimis, perhitungan didasarkan kepada suku bunga riil yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang dapat diperoleh.

$$N = 37.288.732 \times (1 + 0,0202)^3 = 39.594.382.$$

Kesehatan

Berdasarkan formula yang digunakan dan hasil perhitungan indeks penyesuaian (lihat Lampiran I) didapatkan besarnya kebutuhan pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

$$N = 40.074 \text{ orang} \times \text{Rp } 2.069 / \text{orang} \times \{(0,45 \times 0,29) + (0,25 \times 0,98) + (0,30 \times 0,06)\}$$

$$N = \text{Rp } 33.165.242$$

Jika dilihat realisasi pengeluaran yang

dikeluarkan pada tahun tersebut sebesar Rp 566.363.213 menunjukkan telah terjadi *overfinancing* dalam penyusunan anggaran sebesar: Rp566.363.213 – Rp33.165.242 = Rp 533.197.971. Berdasarkan asumsi suku bunga deposito, inflasi dan suku bunga riil maka diperoleh besarnya kebutuhan pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 3 tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Pesimis, perhitungan didasarkan kepada tingkat suku bunga deposito rata-rata yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang sukar diperoleh.

$$N = 33.165.242 \times (1 + 0,1870)^3 = 55.467.083.$$

Rp. 33.165.242,00 adalah kebutuhan belanja Dinas Kesehatan kota Padang Panjang pada tahun 1999/2000 (lihat Lampiran I tabel kedua).

2. Moderat, perhitungan didasarkan kepada inflasi rata-rata yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang mungkin dapat diperoleh.

$$N = 33.165.242 \times (1 + 0,1668)^3 = 52.683.235.$$

3. Optimis, perhitungan didasarkan kepada suku bunga riil yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang dapat diperoleh.

$$N = 33.165.242 \times (1 + 0,0202)^3 = 35.215.927.$$

Kategori Jalan

Berdasarkan formula yang digunakan dan hasil perhitungan indeks penyesuaian (lihat Lampiran III) didapatkan besarnya kebutuhan pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

$$N = 86,59 \text{ km} \times \text{Rp } 1.508.086/\text{km} \times \{(0,34 \times 1,00) + (0,26 \times 0,04) + (0,20 \times 12,70) + (0,2 \times 0,06)\}$$

$$N = \text{Rp } 378.696.984.$$

Jika dilihat realisasi pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun tersebut sebesar Rp 1.594.740.234 menunjukkan telah terjadi *overfinancing* dalam penyusunan anggaran sebesar Rp. 1.594.740.234 – Rp. 378.696.984 = Rp 1.216.043.250. Berdasarkan asumsi suku bunga deposito, inflasi dan

suku bunga riil, maka diperoleh besarnya kebutuhan pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang 3 tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Pesimis, perhitungan didasarkan kepada tingkat suku bunga deposito rata-rata yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang sukar diperoleh.

$$N = 378.696.984 \times (1 + 0,1870)^3 = 633.350.333.$$

Rp. 378.696.984,00 adalah kebutuhan belanja Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga kota Padang Panjang pada tahun 1999/2000 (lihat Lampiran III tabel kedua).

2. Moderat, perhitungan didasarkan kepada inflasi rata-rata yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang mungkin dapat diperoleh.

$$N = 378.696.984 \times (1 + 0,1668)^3 = 601.562.988.$$

3. Optimis, perhitungan didasarkan kepada suku bunga riil yang berarti bahwa kebutuhan pengeluaran yang dapat diperoleh.

$$N = 378.696.984 \times (1 + 0,0202)^3 = 402.112.713$$

b. Kinerja Pemerintah

Pendidikan Dasar

Selama Tahun Anggaran 1999/2000 Dinas Pendidikan Dasar mengelola 1 program Pembinaan Pendidikan Dasar dan 5 proyek berupa Proyek Pengadaan dan Perbaikan Prasarana Lingkungan SD/MI, Proyek Pengadaan sarana Pendidikan, Proyek Rehabilitasi Gedung SD, Proyek Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan, Proyek Penunjang Revitalisasi SD/MI. Indikator *input* pada proyek pengadaan dan perbaikan prasarana lingkungan SD/MI dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang ditetapkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan rehabilitasi WC, SD/MI terhadap target yang ditetapkan, sedangkan Indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi pengadaan dan perbaikan prasarana lingkungan SD/MI terhadap jumlah SD/MI yang ada di Kota Padang Panjang. Dari hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja

kategori Pendidikan Dasar didapatkan ukuran kinerja atas proyek pengadaan dan perbaikan prasarana lingkungan SD/MI di Kota Padang Panjang sebesar 82,07 %.

Indikator *input* pada proyek pengadaan sarana pendidikan (mobiler SD) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang ditetapkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan pengadaan 34 paket mebeler untuk 34 SD yang dianggarkan, sedangkan Indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi pengadaan sarana pendidikan (mobiler SD) terhadap jumlah SD yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori Pendidikan Dasar didapatkan ukuran kinerja atas proyek pengadaan sarana pendidikan di Kota Padang Panjang sebesar 84,34%.

Indikator *input* pada proyek rehabilitasi gedung SD dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang ditetapkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan rehabilitasi gedung SD sebanyak 18 unit, sedangkan Indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi rehabilitasi gedung SD terhadap jumlah SD yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori Pendidikan Dasar didapatkan ukuran kinerja atas proyek rehabilitasi gedung SD di Kota Padang Panjang sebesar 67,39 %

Indikator *input* pada proyek perencanaan pengendalian dan pengawasan dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang ditetapkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan perencanaan pengendalian dan pengawasan yang menjadi target, sedangkan Indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi perencanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pembinaan pendidikan dasar di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori Pendidikan Dasar didapatkan ukuran kinerja atas proyek perencanaan pengendalian dan pengawasan di Kota Padang Panjang sebesar 73,18%.

Indikator *input* pada proyek penunjang revitalisasi SD dan MI dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap anggaran yang ditetapkan. Indikator *output*

dihitung dari persentase realisasi kegiatan penunjang revitalisasi SD dan MI dari target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi penunjang revitalisasi SD dan MI terhadap SD dan MI yang ada di Kota Padang Panjang. Dari hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori Pendidikan Dasar, didapatkan ukuran kinerja atas proyek penunjang revitalisasi SD dan MI di Kota Padang Panjang sebesar 93,74%.

Selanjutnya dari hasil perhitungan nilai capaian akhir kegiatan dan bobot kinerja proyek didapatkan ukuran kinerja atas program pembinaan pendidikan dasar sebesar 80,40 % dari dana yang tersedia. Jika nilai capaian program dikalikan dengan bobot program maka diperoleh nilai capaian kebijaksanaan sebesar 80,40. Hal ini berarti bahwa kinerja Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori "sedang". Ini berarti bahwa semua sumber-sumber dan potensi yang ada sudah digunakan dengan cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

Kesehatan

Selama Tahun Anggaran 1999/2000 Dinas Kesehatan mengelola 1 program Perbaikan Gizi dengan 3 proyek berupa, proyek penanggulangan kekurangan energi protein (KEP), proyek pengadaan makanan tambahan, proyek penunjang penanggulangan kekurangan energi protein.

Indikator *input* pada proyek penanggulangan kekurangan energi protein (KEP) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap anggaran yang disediakan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan penanggulangan kekurangan energi protein atas target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi penanggulangan kekurangan energi protein terhadap rencana yang dianggarkan di Kota Padang Panjang. Dari hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori kesehatan didapatkan ukuran kinerja atas proyek penanggulangan kekurangan energi protein (KEP) di Kota Padang Panjang sebesar 100%.

Indikator *input* pada proyek pengadaan makanan tambahan dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan

terhadap anggaran yang disediakan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan pengadaan makanan tambahan untuk 1086 orang murid SD tidak mampu, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi pengadaan makanan tambahan untuk murid SD tidak mampu terhadap jumlah murid SD yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori kesehatan didapatkan ukuran kinerja atas proyek pengadaan makanan tambahan di Kota Padang Panjang sebesar 60,80%.

Indikator *input* pada proyek penunjang penanggulangan KEP dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang ditetapkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan penunjang penanggulangan KEP dari anggaran yang disediakan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi penunjang penanggulangan KEP terhadap rencana yang dianggarkan di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori kesehatan didapatkan ukuran kinerja atas proyek penunjang penanggulangan KEP di Kota Padang Panjang sebesar 94,25%.

Selanjutnya dari hasil perhitungan nilai capaian akhir kegiatan dan bobot kinerja proyek didapatkan ukuran kinerja atas program perbaikan gizi sebesar 90,65% dari dana yang tersedia. Jika nilai capaian program dikalikan dengan bobot program maka diperoleh nilai capaian kebijaksanaan sebesar 90,65. Hal ini berarti bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori "baik". Ini berarti bahwa semua sumber-sumber dan potensi yang ada sudah digunakan secara efisien. Dana sudah dialokasikan dengan tepat sasaran.

Jalan

Selama Tahun Anggaran 1999/2000 Dinas Pekerjaan Umum mengelola 2 program yaitu program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan 3 proyek berupa proyek pemeliharaan rutin (paket I), proyek pemeliharaan periodik (paket II), proyek pemeliharaan periodik (paket III) serta program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan 3 proyek terdiri atas proyek peningkatan jalan (paket IV), proyek peningkatan jalan (paket V), proyek

perencanaan supervisi dan monitoring.

Indikator *input* pada proyek pemeliharaan rutin (paket I) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang dianggarkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan pemeliharaan rutin (paket I) sepanjang 40,139 km terhadap target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi pemeliharaan rutin (paket I) sepanjang 40,139 km terhadap panjang jalan yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori jalan didapatkan ukuran kinerja atas proyek pemeliharaan rutin (paket I) sebesar 73,18%.

Indikator *input* pada proyek pemeliharaan periodik (paket II) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang dianggarkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan pemeliharaan periodik (paket II) sepanjang 3,35 km terhadap target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi pemeliharaan periodik (paket II) sepanjang 3,35 km terhadap panjang jalan yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori jalan didapatkan ukuran kinerja atas proyek pemeliharaan periodik (paket II) sebesar 51,93%.

Indikator *input* pada proyek pemeliharaan periodik (paket III) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang dianggarkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan pemeliharaan periodik (paket III) sepanjang 1,1 km terhadap target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi pemeliharaan periodik (paket III) sepanjang 1,1 km terhadap panjang jalan yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori jalan didapatkan ukuran kinerja atas proyek pemeliharaan periodik (paket III) sebesar 50,64%.

Untuk program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dapat dijelaskan bahwa Indikator *input* pada proyek peningkatan jalan (paket IV) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran

pembangunan terhadap target yang dianggarkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan peningkatan jalan Simpang Ganting Tanah Bato (paket IV) sepanjang 1,3 km terhadap target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi peningkatan jalan (paket IV) sepanjang 1,3 km terhadap panjang jalan yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori jalan didapatkan ukuran kinerja atas proyek peningkatan jalan (paket IV) sebesar 50,75%.

Indikator *input* pada proyek peningkatan jalan (paket V) dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang dianggarkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan peningkatan jalan (paket V) sepanjang 0,95 km terhadap target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi peningkatan jalan (paket V) sepanjang 0,95 km terhadap panjang jalan yang ada di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori jalan didapatkan ukuran kinerja atas proyek peningkatan jalan (paket V) sebesar 50,55%. Indikator *input* pada proyek perencanaan supervisi dan monitoring dihitung dari persentase perbandingan realisasi pengeluaran pembangunan terhadap target yang dianggarkan. Indikator *output* dihitung dari persentase realisasi kegiatan perencanaan supervisi dan monitoring terhadap target yang ditetapkan, sedangkan indikator *outcome* dihitung dari persentase realisasi perencanaan supervisi dan monitoring terhadap perencanaan teknis yang direncanakan di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian dan bobot kinerja kategori jalan didapatkan ukuran kinerja atas proyek perencanaan supervisi dan monitoring sebesar 98,02%.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai capaian akhir kegiatan dan bobot kinerja proyek didapatkan ukuran kinerja atas masing-masing program pada Dinas Pekerjaan Umum (jalan) Kota Padang Panjang sebesar 57,65% dan 63,92%. Jika nilai capaian program dikalikan dengan bobot program maka diperoleh nilai capaian kebijaksanaan sebesar 59,78. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum (jalan) Kota Padang Panjang termasuk dalam kategori “kurang”. Ini berarti bahwa semua sumber-sumber dan

potensi yang ada belum digunakan secara efisien. Dana belum dialokasikan dengan tepat sasaran, mengindikasikan masih adanya pemborosan anggaran.

KESIMPULAN

1. Hasil dari implementasi model Standar Analisis Belanja di Kota Padang Panjang periode Tahun Anggaran 1991/1992 sampai dengan 1999/2000 menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran Pemerintah Kota Padang Panjang untuk ketiga kategori, yaitu kategori pendidikan dasar, kesehatan dan jalan pada tahun anggaran 1999/2000 mengalami *overfinancing*. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran pada ketiga dinas tersebut tidak didasarkan kepada hasil kerja yang efisien dan yang memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat (kepentingan publik).
2. Dengan menggunakan Metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap pengukuran kinerja pengeluaran pembangunan pada Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (Jalan) pada Tahun Anggaran 1999/2000 menunjukkan bahwa kinerja pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar termasuk dalam kategori “sedang” dengan nilai capaian kebijaksanaan sebesar 80,40. Ini berarti bahwa semua sumber-sumber dan potensi yang ada sudah digunakan dengan cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Nilai capaian kebijaksanaan Dinas Kesehatan sebesar 90,65 yang berarti bahwa kinerja pengeluaran pembangunan dinas tersebut termasuk dalam kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kepentingan publik. Kinerja pengeluaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (Jalan) berada dalam kategori “kurang” dengan nilai capaian kebijaksanaan sebesar 59,78. Ini berarti bahwa semua sumber-sumber dan potensi yang ada belum digunakan secara efisien. Dana belum dialokasikan dengan tepat sasaran, mengindikasikan masih adanya pemborosan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincoln (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.

Dallen, Hendrick P.V dan Otto H. Swank (1996), "Government Spending Cycle: Ideological or Opportunities", *Journal of Public Choice*, No.89, 183-200.

Indrajaya, Edi (2000), Studi Kebutuhan dan Kinerja Pengeluaran Pemerintah Pada Infrastruktur Untuk Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman, *Tesis S-2 Program Pascasarjana- UGM*, Tidak Dipublikasikan.

Ma, Jun (1997), *Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries (Case of United States, Canada, The United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, India, and Indonesia)*, Prepared for Macroeconomic Management and Policy Devison Economics Development Institute, Policy Research Working Paper, Vol.1 No.WPS. 1822, The World Bank, Washington DC.

Mangkoesebroto, Goeritno (1991), *Ekonomi Publik*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pusat Antar Universitas Studi ekonomi Universitas Gadjah Mada (1999), *Laporan Interim Pengembangan Model Standar Analisis Belanja Anggaran Daerah*, Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soeratno dan Lincoln Arsyad (1999), *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UUP-AMP YKPN, Yogyakarta.

Yunasri (2000), Evaluasi Pengeluaran Pemerintah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah di

Kota Yogyakarta Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, *Tesis S-2 Program Pascasarjana- UGM*, Tidak Dipublikasikan.

—————, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

—————, Undang-Undang No,25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

LAMPIRAN I

Hasil Perhitungan Indeks Penyesuaian dan Kebutuhan Pengeluaran
Kategori Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
Propinsi Sumatera Barat

Ni adalah Satuan Ukur x Rata-rata Biaya per Unit x Indeks Penyesuaian
Ni adalah Jumlah Penduduk x Rata-rata Biaya per Unit x (a3 IKB + a4 IHH + a5IHKP)

Tahun	Jumlah Penduduk Kota PP (orang)	Jumlah Penduduk Propinsi (orang)	Pengeluaran Pemerintah Propinsi (Rp)	Rata-rata biaya per unit (Rp)	Tingkat Kematian Bayi Kota PP (orang)	Tingkat Kematian Bayi rata-rata Propinsi (orang)	Usia Harapan Hidup Kota PP (tahun)	Usia Harapan Hidup rata-rata Propinsi (tahun)	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota PP (org/km)	Tingkat Kepadatan Penduduk rata-rata Propinsi (org/km)
91/92	38,554	4,075,300	1,769,957,494	434	15	74	63.82	62.46	1,449	96
92/93	39,443	4,139,400	1,632,561,220	394	24	72	63.82	62.46	1,483	98
93/94	39,900	4,203,000	2,143,102,498	510	27	77	63.82	62.46	1,735	99
94/95	40,200	4,265,900	2,590,856,126	607	9	50	63.82	62.46	1,748	101
95/96	40,600	4,328,200	2,541,630,877	587	9	33	63.82	64.84	1,765	102
96/97	40,900	4,390,000	2,397,392,671	546	6	39	63.82	64.84	1,778	104
97/98	41,300	4,451,300	2,557,775,862	575	5	38	66.84	64.84	1,796	105
98/99	41,050	4,473,250	2,863,029,259	640	11	45	66.84	64.84	1,785	106
99/00	40,074	4,541,975	9,398,609,455	2,069	36	46	66.84	64.84	1,742	108

Tahun	Bobot Tingkat Kematian (a3)	Indeks Kematian Bayi (a4)	Bobot Usia Harapan Hidup (a5)	Invers Indeks Harapan Hidup	Bobot Kepadatan Penduduk (a5)	Invers Indeks Kepadatan Penduduk	Indeks Penyesuaian Hidup Kota PP	Realisasi Balanja Kota Padang Panjang (Rp)	Kebutuhan Balanja Kota Padang Panjang (Rp)	Keterangan
93/94	0.45	0.35	0.25	0.98	0.30	0.06	0.40	262,116,690	8,139,600	overfinancing
94/95	0.45	0.18	0.25	0.98	0.30	0.06	0.40	301,712,814	9,760,560	overfinancing
95/96	0.45	0.27	0.25	1.02	0.30	0.06	0.40	360,864,447	9,532,880	overfinancing
96/97	0.45	0.15	0.25	1.02	0.30	0.06	0.40	385,106,641	8,932,560	overfinancing
97/98	0.45	0.13	0.25	0.97	0.30	0.06	0.40	490,573,016	9,499,000	overfinancing
98/99	0.45	0.25	0.25	0.97	0.30	0.06	0.40	652,324,932	10,508,800	overfinancing
99/00	0.45	0.78	0.25	0.97	0.30	0.06	0.40	566,363,213	33,165,242	overfinancing
rata2	0.45	0.29	0.25	0.98	0.30	0.06	0.40			

LAMPIRAN II

**Hasil Perhitungan Indeks Penyesuaian dan Kebutuhan Pengeluaran
Kategori Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang
Propinsi Sumatera Barat**

**Ni adalah Satuan Ukur x Rata-rata Biaya per unit x Indeks Penyesuaian
Ni adalah Murid SD x Rata-rata Biaya per Unit x (a1 IU + a2 IPNS)**

Tahun	Jumlah Murid SD Kota PP (orang)	Jumlah Murid SD Propinsi (orang)	Pengeluaran Pemerintah Propinsi (Rp)	Rata2 Biaya per Unit (Rp)	Upah Guru Kota PP (Rp/bln)	Upah Guru rata-rata Propinsi (Rp/bln)	Pelajar Tidak Mampu Kota PP (orang)	Pelajar Tidak Mampu Propinsi (orang)	Bobot Tingkat Upah (a1)	Indeks Upah Guru
91/92	5,737	650,571	3,864,871,533	5,941	199,507	213,758	287	8,666	0.53	0.93
92/93	5,789	677,531	3,922,911,434	5,790	259,974	278,544	289	8,783	0.53	0.93
93/94	5,857	673,770	4,469,860,201	6,634	327,160	350,528	293	7,990	0.53	0.93
94/95	5,837	679,125	5,309,387,334	7,818	347,033	371,821	292	10,386	0.53	0.93
95/96	7,592	694,534	3,265,384,240	4,702	399,826	428,384	380	11,582	0.53	0.93
96/97	5,625	650,063	4,279,698,896	6,584	454,061	486,480	288	13,205	0.53	0.93
97/98	5,752	655,851	4,244,808,134	6,472	520,413	557,570	360	13,472	0.53	0.93
98/99	5,450	615,165	5,265,703,404	8,560	650,871	697,340	789	13,811	0.53	0.93
99/00	5,428	625,981	8,431,678,503	13,470	902,121	966,532	1086	14,045	0.53	0.93
Rata-rata									0.53	0.93

Tahun	Bobot Pelajar Tidak Mampu (a2)	Indeks Pelajar Tidak Mampu	Indeks Penyesuaian	Realisasi Belanja Kota Padang Panjang (Rp)	Kebutuhan Belanja Kota Padang Panjang (Rp)	Keterangan
91/92	0.47	0.03	0.51	987,332,404	17,382,594	overfinancing
92/93	0.47	0.03	0.51	1,199,964,078	17,094,338	overfinancing
93/94	0.47	0.04	0.51	1,588,307,072	19,816,222	overfinancing
94/95	0.47	0.03	0.51	1,541,958,591	23,273,170	overfinancing
95/96	0.47	0.03	0.51	1,681,472,064	18,205,768	overfinancing
96/97	0.47	0.02	0.51	1,901,892,296	18,891,208	overfinancing
97/98	0.47	0.03	0.51	2,333,990,196	18,985,741	overfinancing
98/99	0.47	0.06	0.51	2,789,214,882	23,792,520	overfinancing
99/00	0.47	0.08	0.51	4,095,032,361	37,288,732	overfinancing
rata-rata	0.47	0.04	0.51			

Catatan : Perhitungan di atas untuk mendukung Analisis Kebutuhan Pengeluaran Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang.

LAMPIRAN III

Hasil Perhitungan Indeks Penyesuaian dan Kebutuhan Pengeluaran
Kategori Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga (Jalan)
Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat

Ni adalah Satuan Ukur x Rata-rata Biaya per Unit x Indeks Penyesuaian
Ni adalah Panjang jalan x Rata-rata Biaya per Unit x (a6 IU + a7IKJ + a8IMsm + a9 IIKP)

Tahun	Panjang Jalan Kota PP (km)	Panjang Jalan Propinsi (km)	Pengeluaran Pemerintah Propinsi (Rp)	Rata-rata Biaya Per Unit (Rp)	Tingkat Upah Kota PP (Rp)	Tingkat Upah Rata-rata Propinsi (Rp)	Panjang Jalan Tidak aspal Kota PP (km)	Panjang Jalan Tidak aspal rata-rata Kota PP (km)	Curah Hujan Kota PP	Curah Hujan Rata2 Prop.	Kepadatan Penduduk Kota PP	Kepadatan Penduduk Rata-rata Propinsi
91/92	68.20	12,344.08	7,136,832,001	578,158	97,864	99,947	20.98	552	3,025	367.65	1,449.00	96.35
92/93	72.87	12,775.41	8,887,932,780	695,706	107,306	107,316	18.44	519	2,906	227.69	1,483.00	97.86
93/94	74.95	12,617.98	9,057,902,581	717,857	128,615	128,619	15.00	504	4,036	318.47	1,734.80	99.37
94/95	80.87	13,261.13	10,098,070,708	761,479	151,101	151,007	20.92	536	2,713	288.89	1,747.80	101.02
95/96	80.87	14,280.84	12,910,495,345	904,043	170,189	171,160	20.12	567	4,275	287.42	1,765.20	102.49
96/97	80.87	14,467.39	17,430,064,848	1,204,783	186,737	186,783	18.42	574	4,117	311.44	1,778.26	103.96
97/98	82.10	15,422.60	20,098,630,308	1,303,193	215,481	214,482	19.65	596	2,324	167.81	1,795.65	105.41
98/99	86.59	14,110.10	18,424,112,560	1,305,739	233,119	231,972	23.74	514	3,705	329.70	1,784.78	105.93
99/00	86.59	14,230.08	21,460,189,147	1,508,086	321,401	320,333	21.78	531	4436	246.00	1,742.35	107.55

Tahun	Bobot Tingkat Upah (a6)	Indeks Upah Jalan	Bobot Kualitas Jalan (a7)	Indeks Kualitas	Bobot Musim (a8)	Indeks Musim	Bobot Kepadatan Penduduk	Invers Indeks Kepadatan penduduk	Indeks Penyesuaian	Realisasi Belanja Kota PP (a9)	Kebutuhan Belanja Kota PP	Keterangan
91/92	0.34	0.98	0.26	0.04	0.20	8.23	0.20	0.07	2.00	484,493,238	114,348,089	overfinancing
92/93	0.34	1.00	0.26	0.04	0.20	12.76	0.20	0.07	2.91	933,169,030	147,018,679	overfinancing
93/94	0.34	1.00	0.26	0.03	0.20	12.67	0.20	0.06	2.89	1,224,591,328	156,029,808	overfinancing
94/95	0.34	1.00	0.26	0.04	0.20	9.39	0.20	0.06	2.24	842,115,545	178,584,340	overfinancing
95/96	0.34	0.99	0.26	0.04	0.20	14.87	0.20	0.06	3.33	1,019,900,860	212,018,876	overfinancing
96/97	0.34	1.00	0.26	0.03	0.20	13.22	0.20	0.06	3.00	1,100,300,520	282,549,324	overfinancing
97/98	0.34	1.00	0.26	0.03	0.20	13.85	0.20	0.06	3.13	1,284,315,227	310,277,221	overfinancing
98/99	0.34	1.00	0.26	0.05	0.20	11.24	0.20	0.06	2.61	1,202,047,750	327,885,426	overfinancing
99/00	0.34	1.00	0.26	0.04	0.20	18.03	0.20	0.06	3.97	1,594,740,234	378,696,984	overfinancing
rata-2	0.34	1.00	0.26	0.04	0.20	12.70	0.20	0.06	2.90			

Catatan : Perhitungan diatas untuk mendukung Analisis Kebutuhan Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum - Bina Marga Kota Padang Panjang.

LAMPIRAN IV

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)

Instansi : Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Program	Proyek/ Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Nilai Capaian Kegiatan (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Pembinaan Pendidikan Dasar	1. Pengadaan dan perbaikan Prasarana Ling- kungan SD/MI	Input	396,750,000	58,052,124	14,63	21	3,07	
			Output	36	36	100,00	31	31,00	
			Outcome	36	36	100,00	48	48	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1						100
		2. Pengadaan Pendidikan	Input Sarana	153,000,000	38,880,000	25,41	21	5,34	
			Output		34	34	100,00	3131,00	
			Outcome	34	34	100,00	48	48,00	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2						100
		3. Rehabilitasi Gedung SD	Input	1,675,585,000	876,190,739	52,29	21	10,98	
			Output	18	18	100,00	31	31,00	
			Outcome	34	18	52,94	48	48,00	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3						100
		4. Perencanaan, Pengendalian, & Pengawasan	Input	41,756,000	25,524,050	61,13	21	12,84	
			Output	25,524,050	25,524,050	100,00	31	31,00	
			Outcome	41,756,000	25,524,050	61,13	48	29,34	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 4						100
		5. Penunjang Revitalisasi SD dan MI	Input	15,000,000	10,530,000	70,20	21	14,74	
			Output	10,530,000	10,530,000	100,00	31	31,00	
			Outcome	36	36	100,00	48	48,00	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 5						100

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-2)

Instansi : Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Kenijaksanaan	Program	Proyek/Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Kegiatan	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1. Pembinaan Pendidikan Dasar	1. Pengadaan dan perbaikan Prasarana Lingkungan SD/MI	82,07	24	19,70
			2. Pengadaan sarana pendidikan	84,34	27	22,77
			3. Rehabilitasi Gedung SD	67,39	21	14,15
			4. Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan	73,18	12	8,78
			5. Penunjang Revitalisasi SD/MI	93,74	16	15,00
			Jumlah Nilai Capaian Program			

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-3)

Instansi : Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Kebijaksanaan	Program	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Program	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Pendidikan dasar	1. Pembinaan Pendidikan Dasar	80,40	100	80,40
		Jumlah Nilai Capaian Kebijakan			100

Catatan : Perhitungan pada tiga tabel diatas untuk mendukung Analisis Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang.

LAMPIRAN V

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)

Instansi : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Program	Proyek/ Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Nilai Capaian Kegiatan (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Perbaikan Gizi	1. Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP)	Input	16,350,000	16,350,000	100,00	20	20,00	
			Output	16,350,000	16,350,000	100,00	31	31,00	
			Outcome	16,350,000	16,350,000	100,00	49	49,00	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1						100
		2. Pengadaan Makanan Tambahan	Input	20,000,000	20,000,000	100,00	20	20,00	
			Output	1,086	1,086	100,00	31	31,00	
			Outcome	5,428	1,086	20,01	49	9,80	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2						100
		3. Penunjang Penanggulangan KEP	Input	30,000,000	27,500,000	91,67	20	18,33	
			Output	27,500,000	27,500,000	100,00	31	31,00	
			Outcome	30,000,000	27,500,000	91,67	49	44,92	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3						100

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-2)

Instansi : Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Kenijaksanaan	Program	Proyek/Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Kegiatan	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Gizi	1. Perbaikan Gizi	1. Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP) 2. Pengadaan makanan tambahan 3. Penunjang Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP)	100,00 60,80 94,25	48 19 33	48,00 11,55 31,10
Jumlah Nilai Capaian Program					100	90,65

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-3)

Instansi : Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Kebijaksanaan	Program	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Program	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Peningkatan Gizi	1. Perbaikan Gizi	90,65	100	90,65
Jumlah Nilai Capaian Kebijakan				100	90,65

Catatan : Perhitungan pada tiga tabel diatas untuk mendukung Analisis Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

LAMPIRAN IV

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Program	Proyek/ Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Nilai Capaian Kegiatan (%)	Bobot Kelompok Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jln & Jembatan	1. Pemeliharaan Rutin (Paket I)	Input	200,000,000	200,000,000	100,00	18	18,00	
			Output	40,139	40,139	100,00	32	32,00	
			Outcome	86,59	40,139	46,36	50	23,18	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1						100
		2. Pemeliharaan Periodik (Paket II)	Input	403,334,000	403,334,000	100,00	18	18,00	
			Output	3,35	3,35	100,00	32	31,00	
			Outcome	86,59	3,35	3,87	48	1,93	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2						100
		3. Pemeliharaan Periodik (Paket III)	Input	107,488,000	107,488,000	100,00	18	18,00	
			Output	1,1	1,1	100,00	32	32,00	
Outcome	86,59		1,1	1,27	50	0,64			
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3						100	67,39		
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	1. Peningkatan Jalan (Paket IV)	Input	469,995,000	469,995,000	100,00	18	18,00	
			Output	1,3	1,3	100,00	32	32,00	
			Outcome	86,59	1,3	1,50	50	0,75	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 1						100
		2. Peningkatan Jalan (Paket V) (Paket IV)	Input	250,557,000	250,557,000	100,00	18	18,00	
			Output	0,95	0,95	100,00	32	32,00	
			Outcome	86,59	0,95	1,10	50	0,55	
			Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 2						100
		3. Perencanaan Supervisi dan Monitoring	Input	121,936,000	118,376,800	97,08	18	17,47	
			Output	118,376,800	118,376,800	100,00	32	32,00	
Outcome	121,936,000		118,376,800	97,08	50	48,54			
Jumlah Nilai Capaian Kegiatan 3						100	93,74		

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-2)

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Kenijaksanaan	Program	Proyek/Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Kegiatan	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Prasarana Jalan	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Pemeliharaan Rutin (Paket I)	73,18	29	21,22
			2. Pemeliharaan Periodik (Paket II)	51,93	37	19,21
			3. Pemeliharaan Periodik (Paket III)	50,64	34	17,22
		Jumlah Nilai Capaian Program				100
		2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan	1. Peningkatan Jalan (Paket IV)	50,75	41	20,81
			2. Peningkatan Jalan (Paket V)	50,55	31	15,67
			3. Perencanaan Supervisi dan Monitoring	98,02	28	27,45
Jumlah Nilai Capaian Program				100	90,65	

Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-3)

Instansi : Dinas Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang

Tahun : 1999 / 2000

No.	Kebijaksanaan	Program	Nilai Capaian Kegiatan	Bobot Program	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. Meningkatkan Prasarana Jalan	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	57,65	66	38,05
		2. Peningkatan Jalan dan Penggantian	63,92	34	21,73
		Jumlah Nilai Capaian Kebijakan			100

Catatan : Perhitungan pada tiga tabel diatas untuk mendukung Analisis Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

LAMPIRAN III

Hasil Pengukuran Kinerja Berdasarkan Metode AKIP

Unit Pelaksana	Program	Proyek/Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan	Nilai Capaian Program	Nilai Capaian Kebijakan	Kategori
Dinas Pendidikan Dasar	Pembinaan Pendidikan Dasar	1. Pengadaan dan Perbaikan Prasarana Lingkungan SD & MI	72,68			
		2. Pengadaan Sarana Pendidikan	76,13			
		3. Rehabilitasi Gedung SD	66,38			
		4. Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan	72,40			
		5. Penunjang Revitalisasi SD & MI	90,46			
				75,10	75,1	Sedang
Dinas Kesehatan	Perbaikan Gizi	1. Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP)	100,00			
		2. Pengadaan Makanan Tambahan	68,00			
		3. Penunjang Penanggulangan Kekurangan Energi Protein	94,17			
				92,00	92,00	Baik
Dinas Pekerjaan Umum (Jalan)	Rehabilitasi & Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Pemeliharaan Rutin (paket I)	80,69			
		2. Pemeliharaan Periodik (paket II)	65,39			
		3. Pemeliharaan Periodik (paket III)	64,46			
	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	1. Peningkatan Jalan (paket IV)	64,54			
		2. Peningkatan Jalan (paket V)	64,39			
		3. Perencanaan Supervisi dan Monitoring	98,02			
				71,04	71,04	Sedang

LAMPIRAN VIII

**Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dan Variabel Pengaruh
Kategori Pendidikan Dasar Kota Padang Panjang
Propinsi Sumatera Barat**

Tahun Ajaran	Murid SD Kota PP (orang)	Upah Guru Kota PP (Rp / bl)	Pelajar Tidak Mampu Kota PP (orang)	Pengeluaran Kota PP (Rp)	Murid SD Propinsi (orang)	Upah Guru Rata-rata Propinsi (Rp / bl)	Pelajar Tidak Mampu Rata-rata Propinsi (orang)	Pengeluaran Propinsi (Rp)
1991/1992	5,737	199,507	287	987,332,404	650,571	213,758	8,666	3,864,871,533
1992/1993	5,789	259,974	289	1,199,964,078	677,531	278,544	8,783	3,922,911,434
1993/1994	5,857	327,160	293	1,588,307,072	673,770	350,528	7,990	4,469,860,201
1994/1995	5,837	347,033	292	1,541,958,591	679,125	371,821	10,386	5,309,387,334
1995/1996	7,592	399,826	380	1,681,472,064	694,534	428,384	11,582	3,265,384,240
1996/1997	5,625	454,061	288	1,901,892,296	650,063	486,480	13,205	4,279,698,896
1997/1998	5,752	520,413	360	2,333,990,196	655,851	557,570	13,472	4,244,808,134
1998/1999	5,450	650,871	789	2,789,214,882	615,165	697,340	13,811	5,265,703,404
1999/2000	5,428	902,121	1,086	4,095,032,361	625,981	966,532	14,045	8,431,678,503

Sumber : Kantor BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 1991-1999
Bagian Keuangan Setda Kota Padang Panjang, Perhitungan APBD TH 1991/1992-1999/2000

